



► **KLINIK RUMAH SWADAYA**

Konsultasi Membangun Rumah Bisa Gratis

UMBULHARJO—Masyarakat DIY-Jawa Tengah (Jateng) kini bisa mengakses jasa konsultasi rumah atau bangunan secara gratis. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan menyelenggarakan Klinik Rumah Swadaya (KRS).

Sebagai *pilot project*, ada empat tempat sebagai percontohan di Indonesia di antaranya DIY dan Jawa Tengah. Pejabat Fungsional Rekayasa Muda Balai Pelaksana Penyedia Perumahan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Dimas Hastama Nugraha (*jaket hitam*) dalam jumpa pers KRS di Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Jogja, Umbulharjo, Jogja, Kamis (24/3).

"Kami juga bisa memberikan trik cara mengawasi pekerjaan



Harian Jogja/Sirojui Khafid

Ketua Tim KRS, Sekar (*memegang mikrofon*) dan Pejabat Fungsional Rekayasa Muda Balai Pelaksana Penyedia Perumahan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Dimas Hastama Nugraha (*jaket hitam*) dalam jumpa pers KRS di Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Jogja, Umbulharjo, Jogja, Kamis (24/3).

tanah yang dimiliki. Termasuk juga dalam hal konstruksi, cara memilih dan memasang bahan yang berkualitas. Tidak luput pula rekomendasi pemasangan perangkat penting seperti sanitasi, ruang ventilasi, dan lainnya.

"Kami juga bisa memberikan trik cara mengawasi pekerjaan

rumah seperti apa. Semua ini agar masyarakat memiliki rumah yang layak huni, dari sisi kualitas dan lainnya," kata Dimas dalam Jumpa Pers KRS di Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Jogja, Umbulharjo, Jogja, Kamis (24/3).

Masyarakat bisa mengakses

layanan ini secara daring melalui krs.perumahan.pu.go.id atau secara luring di kantor KRS yang beralamat di Jalan Laksda Adisudjipto No.165 Jogja. Layanan ini utamanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Ketua Tim KRS, Sekar, mengatakan agar bisa memberikan solusi, termasuk efisiensi biaya, KRS bekerja sama dengan berbagai pihak. Misalnya dalam hal arsitektur dengan Universitas Gadjah Mada (UGM), pembiayaan dengan Bank BTN, Dinas Pertanahan, serta lainnya.

"Sejak KRS dirilis pada 10 Maret 2022, masyarakat sudah mengakses secara daring. Sudah ada 54 pertanyaan yang masuk," kata Sekar. "Klinik sejenis KRS sebenarnya sudah ada sebelumnya, tapi banyak yang mati suri. Akar masalahnya adalah sosialisasi yang kurang masif. Sehingga

kini kami gencar sosialisasi, termasuk semoga ke depan bisa membuat agen KRS di wilayah-wilayah."

KRS juga bisa membantu masyarakat seiring dengan akan berubahnya Izin Mengurus Bangunan menjadi Peretujuan Bangunan Gedung (PBG). Dalam PBG perlu melampirkan desain dan lainnya. Di KRS sudah ada beberapa *template* yang bisa memudahkan masyarakat mengurus itu.

Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Jogja, Sigit Setiawan, mengatakan KRS bisa menjadi pengingat tragedi gempa Jogja 2006. "Masyarakat perlu mengingat apabila DIY memiliki potensi gempa. Sehingga perlu memiliki rumah yang layak huni," katanya. (*Sirojui Khafid*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005